

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

2.1.1.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan merupakan sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Salah satu tolak ukur pembangunan manusia dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia.

Indeks pembangunan manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks pembangunan manusia dikenalkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). (Badan Pusat Statistik).

Menurut BPS (2009), indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, indeks pembangunan manusia dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya

bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak.

Indikator pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli, sedangkan dampak non-fisik dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat.

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini Indeks Pembangunan Manusia dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran Indeks Pembangunan Manusia pada awal dan akhir periode tersebut.

Dalam UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia

(“*a process of enlarging people’s choices*”). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari salah satu organisasi pembangunan manusia sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah :

- a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
- b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- d. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu : produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
- e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Sejak tahun 1990 *United Nations Development Program* (UNDP) mengembangkan suatu indeks yang sekarang dikenal dengan istilah Indeks

Pembangunan Manusia (Human Development Index = HDI). Indikator - indikator yang digunakan untuk menyusun indeks ini adalah :

- a) Tingkat taraf hidup
- b) Tingkat melek huruf masyarakat
- c) Tingkat pendapatan riil per kapita berdasarkan daya beli masing-masing negara. Indeks ini besarnya antara 0 sampai dengan 1,0. Semakin mendekati 1 berarti indeks pembangunan manusia-nya tinggi , demikian sebaliknya.

Menurut napitupulu (2017) Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu tolak ukur pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut, karena diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat yang tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi maka seharusnya kemiskinan rendah. Kualitas sumberdaya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/ indeks pembangunan manusia (Rizaldi Zakaria, 2017).

Menurut hasan (2016) Teori pembentukan indeks pembangunan manusia (IPM) dapat diukur dengan dimensi diantaranya adalah : berumur panjang dan sehat di tunjukkan oleh harapan hidup ketika lahir yang dirumuskan menjadi menjadi angka harapan hidup. Kemudian pada dimensi ilmu pengetahuan yang diukur dari tingkat baca tulis dan rata-rata lama sekolah dapat dirumuskan

menjadi indeks pendidikan. Terakhir adalah dimensi standar hidup layak yang ditunjukkan oleh pengeluaran riil perkapita (Rizaldi Zakaria, 2017).

Sama seperti IKH, IPM ini juga digunakan untuk melakukan pemerin terhadap kinerja pembangunan berbagai Negara di dunia. Berdasarkan indeks IPM-nya , Negara-negara di dunia ini dikelompokan menjadi tiga yaitu :

- a. Kelompok Negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah (*low human development*), bila memiliki nilai IPM antara 0 sampai 0,50
- b. Kelompok Negara dengan tingkat pembangunan manusia menengah (*medium human development*), bila memiliki nilai IPM antara 0,50 sampai 0,79
- c. Kelompok Negara dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi (*high human development*), bila memiliki nilai IPM antara 0,79 sampai 1.

2.1.1.2 Pengukuran Pembangunan Manusia

Indikator komposit pembangunan manusia adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat pencapain pembangunan manusia antar wilayah dan antar waktu. Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan alat ukur yang dapat menunjukkan persentase pencapaian dalam pembangunan manusia dengan memperhatikan tiga faktor yaitu kelangsungan hidup, pengetahuan dan daya beli.

$$\text{IPM} = 1/3 (\text{indeks harapan hidup}) + 1/3 (\text{indeks pendidikan}) + 1/3 (\text{indeks daya beli}).$$

Skor indeks pembangunan manusia ini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka 1 semakin tinggi nilai IPM-nya dan semakin berkualitas SDM yang dimiliki oleh suatu negara. Demikian pula sebaliknya. Indeks pembangunan manusia ini oleh UNDP dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu :

- 1) *Very High* HDI : untuk nilai IPM ≥ 0.800
- 2) *High* HDI : $0.700 \leq$ nilai IPM < 0.800
- 3) *Medium* HDI : $0.550 \leq$ nilai IPM < 0.700
- 4) *Low* HDI : nilai IPM ≤ 0.550

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen indeks pembangunan manusia digunakan batas minimum dan maksimum.

2.1.2 Kemiskinan

2.1.2.1 Pengertian kemiskinan

Dalam arti populer kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut kuncoro (2004 : 141) kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua Negara di dunia. Di Indonesia strategi pembangunan yang diprioritaskan pada pemerataan hasil-

hasil pembangunan dimulai sejak PELITA III. Ini sejalan dengan amanat GBHN bahwa arah dan tujuan pembangunan nasional Indonesia harus dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan hasil-hasil yang dicapai harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Menurut para ahli (antara lain Andre Bayo Ala, 1981), kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan ; dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawat kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Asyad,2004:237).

Kotze menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Kendatipun Bantuan dari luar kadang-kadang digunakan, tapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada masyarakat dapat hidup dan berkembang bila terisolasi dari kelompok masyarakat lainnya.

Pengisolasian ini menimbulkan sifat Pasif, bahkan keadaan menjadi semakin miskin (Hikmat: 6 : 2004).

Menurut Supriatna (1997) kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, pendapatan, produktivitas kerja, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik yang melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal (Aldi Astri Damayanti, 2016)

Menurut Supriatna (1997) mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin adalah :

- 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri
- 2) Tidak mempunyai kemampuan memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri
- 3) Tingkat pendidikan yang pada umumnya rendah
- 4) Banyak diantara mereka yang tidak memiliki fasilitas
- 5) Diantara mereka berusia relatif muda dan tidak memiliki keterampilan atau pendidikan atau pendidikan yang memadai.

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai satu taraf yang dianggap manusiawi (Bappenas : 2020).

Fernandez (2001) menambahkan tentang beberapa ciri masyarakat miskin ditinjau dari beberapa aspek antara lain :

- a) Akses Politik : tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka.
- b) Aspek Sosialisas : tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada
- c) Aspek Ekonomi : rendahnya tingkat sumber daya manusia, termasuk kesehatan pendidikan keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan; dan rendahnya kepemilikan atas aset fisik, termasuk aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan

Aspek Budaya atau Nilai : terperangkap dalam budaya rendahnya kualitas sumber daya manusia seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan mudah menyerah (Arsyad 2015 : 300).

Menurut Ravalion (2001) kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak ada biaya untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak dapat sekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidak berdayaan, terpinggiran dan tidak memiliki kebebasan (Arsyad 2015 : 299).

2.1.2.2 Penyebab Kemiskinan

Menurut Fredericks (1985) para pembuat kebijakan pembangunan selalu berupaya agar alokasi sumberdaya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat. Namun demikian, karena ciri dan keadaan masyarakat amat beragam dan ditambah pula dengan tingkat kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan yang masih lemah, maka kebijakan nasional umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek. Sehingga kebijakan pemerintah belum berhasil memecahkan persoalan kelompok ekonomi di tingkat bawah (Swapna Mukhopadhyay, 1985). Selain itu, kebijakan dalam negeri sering kali tidak terlepas dengan keadaan yang ada di luar negeri yang secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan antara lain dari segi pendanaan pembangunan (Arsyad 2015 : 300).

Kemiskinan dapat diamati sebagai anggota masyarakat yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun kualitas produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan. Ketidak ikut sertaan dalam proses pembangunan ini dapat disebabkan karena secara alamiah tidak/belum mampu memperdaya gunakan faktor produksinya, dan dapat pula terjadi secara alamiah.

Sumarjan, 1990 Oleh karena itu kemiskinan di samping merupakan masalah yang muncul dalam masyarakat berkaitan dengan kepemilikan faktor

produksi. Produktivitas dalam tingkat perkembangan masyarakat sendiri, juga bertalian dengan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan. Dengan kata lain masalah kemiskinan ini bisa selain ditimbulkan oleh hal yang sifatnya alamiah/kultural juga disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, sehingga para pakar pemikir tentang kemiskinan kebanyakan melihat kemiskinan sebagai masalah struktural. Dan pada akhirnya timbul istilah kemiskinan struktural yakni kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial yakni kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Arsyad,2015 : 300).

2.1.2.3 Macam Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai makna yang luas dan memang tidaklah mudah untuk mengukurnya. Namun, dalam bagian ini akan dijelaskan dua macam ukuran kemiskinan yang paling umum digunakan, yaitu :

a) Kemiskinan Absolut

Todaro dan Smith, 2003 mengatakan kemiskinan dapat pula kita ukur dengan memperbandingkan tingkat pendapat orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan

minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut dengan garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Arsyad, 2015 : 301)

b) Kemiskinan Relatif

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti orang tersebut “tidak miskin”. Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat disekitarnya , maka orang tersebut masih berada dalam kategori miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya dari lingkungan orang yang bersangkutan . konsep inilah yang kemudian kita kenal sebagai konsep kemiskinan relatif.

2.1.2.4 Lingkaran Kemiskinan

Konsep lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) ini pertama kali dikenal oleh Ragnar Nurkse dalam bukunya yang berjudul *Problems of Capital*

Formation in Underdeveloped Countries (1953). Nurkse merupakan salah seorang pelopor penelitian tentang masalah pembentukan modal di NSB. Nurkse mengemukakan konsep tersebut sebagai sebuah landasan untuk menjelaskan tentang perlunya strategi pembangunan seimbang di NSB.

Menurut Nurkse, kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh tidak adanya pembangunan pada masa lalu, tetapi kemiskinan juga menjadi faktor penghambat dalam pembangunan di masa mendatang. Sehubungan dengan hal itu, lahirilah suatu ungkapan Nurkse yang sangat terkenal adalah “*a country is poor because it is poor*”. Salah satu faktor yang diidentifikasi Nurkse sebagai penyebab timbulnya lingkaran kemiskinan adalah adanya hambatan yang sangat kuat dalam proses pembentukan modal.

Jadi menurut pandangan Nurkse ada dua jenis lingkaran kemiskinan yang menghalangi NSB untuk mencapai tingkat pembangunan yang pesat yaitu :

1. Dari segi penawaran modal, lingkaran kemiskinan dapat dinyatakan sebagai berikut : tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah.
2. Dari segi permintaan modal, corak lingkaran kemiskinan mempunyai bentuk yang agak berbeda. Di NSB, faktor pendorong untuk kegiatan investasi relatif rendah karena luar pasar untuk berbagai jenis barangnya terbatas. Terbatasnya

pasar disebabkan pendapatan yang rendah. Dan produktivitas yang rendah seringkali disebabkan oleh terbatasnya pembentukan modal di masa lampau. Pembentukan modal yang relatif terbatas ini disebabkan oleh adanya kekurangan pada faktor pendorong kegiatan investasi.

Pada bagian dari analisisnya, Nurkse menyatakan bahwa peningkatan pembentukan modal bukan hanya dibatasi oleh lingkaran kemiskinan, tetapi juga oleh adanya efek pamer internasional (*International demonstration effect*). Efek pamer internasional ini dapat didefinisikan sebagai suatu kecenderungan untuk meniru pola konsumsi dari masyarakat yang lebih maju (Arsyad, 2015 : 112).

2.1.2.5 Indeks Kemiskinan Manusia

Indeks ini diperkenalkan oleh UNDP (*United Nations Development Program*) dalam salah satu laporan tahunannya, Human Development Report (1997). Indeks ini terlahir karena ketidakpuasan UNDP dengan indikator pendapatan per dollar per hari yang digunakan oleh Bank Dunia sebagai tolak ukur kemiskinan di suatu wilayah (negara). Dengan indeks ini, UNDP berusaha mengganti ukuran kemiskinan dari segi pendapatan (Bank Dunia) dengan ukuran dari segi kualitas hidup manusia. Argumen umum yang digunakan oleh UNDP adalah bahwa tolak ukur kemiskinan dari seseorang adalah jika dia tidak mampu menjangkau (atau bahkan tidak mempunyai akses) terhadap sarana publik dasar dan tingkat kualitas hidup mereka sendiri adalah rendah. Jadi, bukan berapa banyak pendapatan per dolar per kapita yang mampu mereka raih tiap harinya.

Sebenarnya, indeks kemiskinan manusia ini banyak memiliki kemiripan dengan indeks pembangunan manusia (Human Development Index). Menurut UNDP, ada tiga nilai pokok yang menentukan tingkat kemiskinan yaitu :

- a. Tingkat kehidupan, dengan asumsi bahwa karena tingkat kesehatan yang begitu rendah, sehingga lebih dari 30 persen penduduk negara-negara terbelakang tidak mungkin hidup lebih dari 40 tahun.
- b. Tingkat pendidikan dasar, diukur oleh persentase penduduk usia dewasa yang buta huruf, dengan beberapa penekanan tertentu, misalnya hilangnya hak pendidikan pada kaum wanita.
- c. Tingkat keamanan ekonomi, diukur oleh persentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap prasarana kesehatan dan air bersih, serta persentase anak-anak di bawah usia lima tahun yang kekurangan gizi.

Oleh karena itu, nilai indeks kemiskinan manusia mempresentasikan proporsi jumlah penduduk di suatu wilayah yang “kehilangan” tiga nilai pokok tersebut. Angka indeks kemiskinan manusia yang rendah pula (persentase penduduk yang kehilangan hak atas tiga nilai utama tersebut relatif kecil), begitu pula sebaliknya (Arsyad,2015 : 305).

2.1.2.6 Hubungan Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia

United Nation Development Program (UNDP) mulai tahun 1990 telah menyusun suatu indikator kesejahteraan manusia berdasarkan faktor-faktor seperti rata-rata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Human Development Index (HDI) atau indeks pembangunan manusia merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah (Putra, 2019 : 218).

Menurut Todaro (2003) terhadap adanya hubungan negatif antara kemiskinan dan kesejahteraan, karena kemiskinan mempunyai aspek yaitu miskin akan aset, organisasi sosial politik, sumber-sumber keuangan dan informasi yang termanifestasikan dan bentuk kekurangan gizi, air, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah, maka akan berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan (Putra, 2019 : 218).

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Pengertian Belanja Modal

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam pasal 50, kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi

menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja salah satu unsurnya yaitu belanja modal.

Belanja modal adalah biaya yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Menurut Halim 2002 : belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya satu tahun anggaran. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya (Lilis Setyowati, 2012). Dalam penelitian ini ukuran dari pengalokasian belanja modal dengan satuannya adalah ribu rupiah .

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi

Baeti, 2013 Belanja modal adalah pengeluaran rutin yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun infrastruktur terutama untuk membangun atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), maka ketika belanja modal meningkat maka indeks pembangunan manusia juga akan meningkat (Rizaldi Zakaria,2017).

2.1.3.2 Macam-macam Belanja Modal

Halim (2008: 101) menyebutkan bahwa yang termasuk dalam Belanja Modal adalah:

- 1) Belanja Modal Tanah;
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin;
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan;
- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- 5) Belanja Aset Tetap lainnya;
- 6) Belanja Aset lainnya.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Belanja Modal dapat diklasifikasikan dalam lima kategori utama:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan) sampai dengan peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian

termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan, dan Jaringan. Belanja Modal Fisik Lainnya juga termasuk Belanja Modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan, ternak dan tumbuhan, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.1.3.3 Indikator Belanja Modal

Belanja modal jumlah dari belanja tanah, belanja peralatan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, jaringan, dan belanja aset lainnya. Pengeluaran untuk perolehan aset (aset tetap) yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk memperoleh tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

2.1.3.4 Hubungan Belanja Modal dengan Indeks Pembangunan Manusia

Pengalokasian dana belanja modal untuk kesejahteraan khususnya di bidang pendidikan, diharapkan berkontribusi lebih besar serta upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Belanja modal ini dapat berupa pembangunan gedung, sarana dan prasarana yang memadai untuk pengamanan bersekolah sehingga kemajuan dalam pendidikan juga akan meningkatkan kualitas pembangunan manusia (Cristy dan Adi, 2009). Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pemenuhan akan kebutuhan dasar akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya yang berkualitas akan mampu memberikan kontribusi dalam kemajuan teknologi yang lebih mutakhir sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas model manusia (Mankiw, 2008).

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Denni Sulistio Mirza (2012) “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2009” alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi panel. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006 -2009 hingga mampu mencapai target IPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan hasil regresi panel menunjukkan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan dengan IPM. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Penelitian yang dilakukan Rizaldi Zakaria (2017) “Pengaruh Tingkat Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2009” penelitian menggunakan data panel dan analisis regresi terbaik menggunakan metode data panel Fixed Effect Model. Hasil regresi terbaik menggunakan metode data *Fixed Effect Model* diketahui bahwa variabel tingkat jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, variabel tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, variabel tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, variabel

tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel tingkat belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian yang dilakukan Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf (2014) “Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten /Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau” penelitian ini menggunakan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis diketahui tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap IPM. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM, masing-masing dengan koefisien regresi - 0,163 dan -0,084. Upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM, dengan koefisien regresi masing-masing 0,005 dan 0,953. Variabel yang sangat besar pengaruhnya terhadap IPM adalah laju pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan Andri Irawan (2020) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 - 2018” penelitian ini menggunakan dalam penelitian ini analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen

dibuktikan dengan nilai f-statistik kecil dari α 5%. Hasil uji t menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y). Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 89,3% dan sisanya sebesar 10,7% dijelaskan oleh faktor lain model ini.

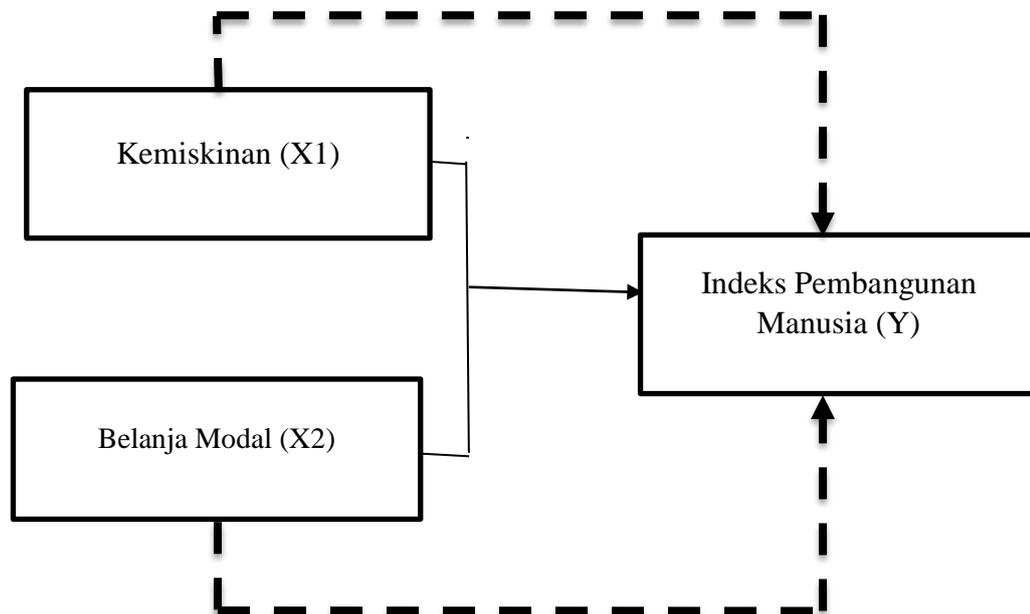
Penelitian yang dilakukan Novegya Ratih Primandari (2019) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2004 - 2018” penelitian ini menggunakan analisis yang digunakan regresi linier berganda dimana pertumbuhan ekonomi dan pengangguran itu variabel bebas dan indeks pembangunan manusia itu variabel terikat. Hasil analisis linier berganda menunjukkan bahwa pertumbuhan dan pengangguran berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia baik secara parsial maupun simultan. Sedangkan untuk kontribusi pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 45,3% dan sisanya 54,7% berasal dari variabel lain seperti kemiskinan, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan.

Penelitian yang dilakukan Gusi Bagus Kompiang Putra Setiawan dan Dewa Nyoman Budiana (2015) “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Provinsi Bali” penelitian ini teknik analisis yang digunakan dalam

penelitian adalah analisis jalur/ path analysis. Hasil Analisis menunjukkan bahwa : belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia , belanja modal berpengaruh secara tidak langsung terhadap indeks pembangunan manusia melalui mediasi pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil z hitung 4,35 lebih besar dibandingkan z tabel 1,96. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan variabel mediasi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Kerangka pemikiran berikut menggambarkan hubungan antara variabel independen, dalam hal ini adalah kemiskinan dan belanja modal variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :



Pengaruh Secara Parsial



Pengaruh Secara Simultan

2.4 Hipotesis

Hipotesis berarti suatu pernyataan yang kedudukannya belum sekuat suatu proposisi atau dalil (Umar, 2010 : 80). Berdasarkan rumusan masalah dan teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa ada pengaruh kemiskinan (X1) dan belanja modal (X2) terhadap indeks pembangunan manusia (Y) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 – 2020 baik secara parsial dan simultan.